

**EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
MENGUNAKAN PERMENPAN NOMOR 59 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Disusun Oleh :**

**AULIA NABILAH**

**NIM : H06217002**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
TAHUN 2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Aulia Nabilah

NIM : H06217002

Program Studi : Sistem Informasi

Angkatan : 2017

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul: “EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK MENGGUNAKAN PERMENPAN NO.59 TAHUN 2020”. Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 27 Juli 2021

Yang menyatakan,



(Aulia Nabilah)  
NIM. H06217002

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh :

NAMA : AULIA NABILAH

NIM : H06217002

JUDUL : EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK MENGGUNAKAN PERMENMPAN NOMOR 59  
TAHUN 2020

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 26 Juli 2021

Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1



Indri Sudanawati Rozas, M.Kom  
NIP. 198207212014032001

Dosen Pembimbing 2



Noor Wahyudi, M.Kom  
NIP. 198403232014031002

## LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK (SPBE) MENGGUNAKAN PERMENPAN  
NOMOR 59 TAHUN 2020

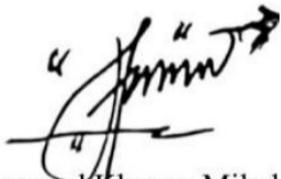
NAMA : AULIA NABILAH

NIM : H06217002

Skripsi tersebut telah dipresentasikan pada Sidang Skripsi di depan Dosen Penguji  
pada tanggal 04 Agustus 2021.

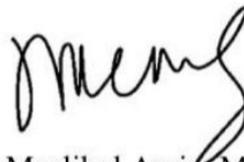
### Menyetujui,

Dosen Penguji 1



Mohammad Khusnu Milad, M.MT  
NIP. 197901292014031002

Dosen Penguji 2



Faris Muslihul Amin, M.Kom  
NIP. 198808132014031001

Dosen Penguji 3



Indri Sudanawati Rozas, M.Kom  
NIP. 198207212014032001

Dosen Penguji 4



Noor Wahyudi, M.Kom  
NIP. 198403232014031002

### Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



Dr. Evi Fatmatur Rusydiyah, M.Ag  
NIP. 197312272005012003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AULIA NABILAH  
NIM : H06217002  
Fakultas/Jurusan : SAINS DAN TEKNOLOGI / SISTEM INFORMASI  
E-mail address : [h06217002@uinsby.ac.id](mailto:h06217002@uinsby.ac.id) / [aulianabila13@gmail.com](mailto:aulianabila13@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK MENGGUNAKAN PERMENPAN NOMOR 59 TAHUN 2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2021

Penulis

(AULIA NABILAH)











































































Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
<b>Domain 2</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>
<b>Aspek 2</b>	<b>Perencanaan Strategis SPBE</b>
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
Indikator 13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
<b>Aspek 3</b>	<b>Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
<b>Aspek 4</b>	<b>Penyelenggara SPBE</b>
Indikator 19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE
<b>Domain 3</b>	<b>Manajemen SPBE</b>
<b>Aspek 5</b>	<b>Penerapan Manajemen SPBE</b>
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia



















		data sesuai peraturan pada seluruh unit kerja di Pemerintah Kota
<b>Indikator 6</b> Kebijakan Internal terkait Layangan Jaringan Intra		Menjalankan kebijakan untuk penggunaan layanan jaringan intra sesuai peraturan yang dibuat pada seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota
<b>Indikator 7</b> Kebijakan Internal terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)		Menjalankan kebijakan penggunaan dari sistem penghubung layanan sesuai peraturan yang dibuat pada seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota
<b>Indikator 8</b> Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi		Menjalankan kebijakan berdasarkan cakupan manajemen keamanan informasi pada Peraturan Presiden No.95 pada seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota
<b>Indikator 9</b> Kebijakan Internal terkait Audit TIK		Menjalankan kebijakan yang mengatur seluruh cakupan dari pelaksanaan Audit TIK SPBE dengan peraturan terbaru sesuai PERMENPAN No. 59
<b>Indikator 10</b> Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE		Menerapkan kebijakan dalam pembentukan serta pembagian tugas pada Tim Koordinasi SPBE di seluruh unit kerja Pemerintah Kota





















10	Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE	5	Peraturan Walikota No. 68 Tahun 2020 (Bab VII Bagian Kesatu Pasal 44)
11	Perencanaan Strategis SPBE terkait Arsitektur SPBE	2	Dokumen Arsitektur SPBE Tahun 2018-2022
12	Perencanaan Strategis SPBE terkait Peta Rencana SPBE	2	Dokumen Arsitektur SPBE Tahun 2018-2022 (Bagian 8 Prioritisasi dan Peta Pandu)
13	Perencanaan Strategis terkait Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2	Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 Dokumen Arsitektur SPBE Tahun 2018-2022 (Bagian VII. Kisaran Anggaran Paket Kegiatan)
14	Perencanaan Strategis terkait Inovasi Proses Bisnis	5	Dokumen Arsitektur SPBE Tahun 2018-2022 (Bagian III. Arsitektur Proses Bisnis, Informasi, dan Potensi Aplikasi)
15	Keterpaduan Pembangunan Aplikasi SPBE	3	Peraturan Walikota No. 68 Tahun 2020 (Bagian Ke-8) Petunjuk Teknis Pembangunan & Pemeliharaan Aplikasi Dokumen sesuai <i>SDLC</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Perencanaan</li> <li>- <i>Software Requirement System</i></li> <li>- <i>Software Design Document</i></li> <li>- Dokumen Pengujian</li> <li>- <i>User Guide</i></li> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Dokumen Pemeliharaan</li> </ul>
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pusat Data</li> <li>- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunjung / Akses Masuk Pusat Data</li> </ul>
17	Penggunaan Layanan Jaringan Intra	3	Diagram Peta Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN)

18	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi GRMS (<i>Government Resource Management System</i>) e-Budgeting, e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery, e-Controlling, e-Performance.</li> <li>- <i>Surabaya Single Window</i></li> <li>- Daftar Sistem Penghubung Layanan (Sebagian sudah diterapkan)</li> </ul>
19	Pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE	5	Surat Keputusan Walikota Surabaya terkait Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Surabaya.
20	Penerapan SPBE secara kolaboratif	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan rapat atau <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan yang kemudian menghasilkan proses integrasi, pembuatan maupun pengembangan Aplikasi.</li> <li>- Kolaborasi dengan organisasi eksternal (kampus) untuk pembuatan Aplikasi dan optimalisasi layanan SPBE.</li> </ul>
21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Risiko Layanan Pusat Data</li> <li>- Manajemen Risiko Layanan Pengetahuan</li> <li>- Manajemen Risiko Layanan Proses Petunjuk Teknis</li> </ul>
22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	Manajemen Keamanan Informasi Layanan Pusat Data
23	Penerapan Manajemen Data	1	-
24	Penerapan Manajemen Aset TIK	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Perencanaan Aset TIK</li> <li>- Dokumen Pengadaan Aset TIK</li> <li>- Dokumen Penggunaan Aset TIK</li> <li>- Dokumen Penghapusan Aset TIK</li> </ul>

25	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang SPBE	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Arsitektur Tahun 2018-2022 (Bagian VI. Sumber Daya Manusia &amp; Kompetensi TI)</li> <li>- Dokumen Perencanaan SDM (Analisis Kebutuhan SDM)</li> <li>- Dokumen Evaluasi</li> <li>- Dokumen Pembaruan Perencanaan</li> </ul>
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	-
27	Penerapan Manajemen Perubahan	1	-
28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3	Seksi Layanan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Service desk</i></li> <li>- <i>Open ticket</i></li> <li>- <i>Close ticket</i></li> </ul>
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	-
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	-
31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	-
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik	5	<i>ePlanning/Single Sign On</i> (Sistem Aplikasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan) Dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya <i>E-Devplan</i> (Sistem Aplikasi Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah) <a href="https://eplanning.surabaya.go.id">https://eplanning.surabaya.go.id</a> <a href="https://devplan.surabaya.go.id">https://devplan.surabaya.go.id</a> Terintegrasi dengan <i>e-budgeting</i> Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut.
33	Tingkat Kematangan Layanan Anggaran Berbasis Elektronik	5	<i>e-Budgeting</i> (Sistem penyusunan anggaran) yang dikelola oleh Unit Kerja Administrasi Pembangunan. <a href="https://ebudgeting.surabaya.go.id">https://ebudgeting.surabaya.go.id</a> Terintegrasi dengan <i>ePlanning</i>

			Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut.
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik	5	Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan (SIPK) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan (DPPK). Aplikasi yang digunakan sebagai pengelola atau penata alur keuangan setiap SKPD serta instansi terkait Kota Surabaya. <a href="https://epayment.surabaya.go.id">https://epayment.surabaya.go.id</a>  Terintegrasi dengan layanan <i>eDelivery</i> Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut.
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik	5	<i>e-Procurement</i> (Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik) Dikelola oleh LPSE Pemerintah Kota Surabaya <a href="https://lpse.surabaya.go.id">https://lpse.surabaya.go.id</a> Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut.
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	5	eSDM (Sistem Informasi dan Pencatatan Kepegawaian) <a href="https://sdm.surabaya.go.id">https://sdm.surabaya.go.id</a>  Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut.
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik	5	Layanan kearsipan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu layanan untuk pengarsipan surat – surat dari Organisasi Perangkat Daerah maupun instansi lingkup Kota Surabaya. Layanan dispusip/manager telah terintegrasi dengan sistem e-Surat. <a href="https://dispusip.surabaya.go.id">https://dispusip.surabaya.go.id</a>  Terintegrasi dengan layanan <i>e-Surat</i>

			Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut.
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik	5	Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2020 <i>Website</i> Sistem Manajemen Barang Daerah yang dikelola oleh Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset, sebagai pengelola terkait barang milik daerah yang berada di lingkup Kota Surabaya. <a href="https://simbada.surabaya.go.id">https://simbada.surabaya.go.id</a>  Layanan ini terintegrasi dengan SIPK/ <i>ePayment</i> . Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut.
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik	5	Sistem atau aplikasi <i>Whistleblowing System</i> merupakan tempat pengaduan atau pelaporan terkait pelanggaran yang terjadi di lingkup internal pemerintah. <a href="https://wbs.surabaya.go.id">https://wbs.surabaya.go.id</a> Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut untuk perbaikan sistem.
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik	5	e-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Sistem untuk kumpulan dari penetapan, penukaran, pengumpulan data, klasifikasi, ikhtisar serta laporan kinerja kepada instansi untuk tanggung jawab serta meningkatkan kinerja. <a href="https://organisasi.surabaya.go.id/sakip">https://organisasi.surabaya.go.id/sakip</a>  Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut.
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja	5	<i>e-Performance</i> (Sistem Informasi Manajemen Kinerja PNS) yang

	Pegawai Berbasis Elektronik		dikelola oleh Unit Kerja Administrasi Pembangunan. <a href="https://eperformance.surabaya.go.id">https://eperformance.surabaya.go.id</a>  Layanan Terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Pencatatan Kepegawaian. Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut.
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	5	<i>Website</i> Media Center atau aplikasi WargaKu Pengaduan berbasis web dapat diakses pada alamat <a href="https://mediacenter.surabaya.go.id">https://mediacenter.surabaya.go.id</a> Aplikasi berbasis android untuk pelayanan publik masyarakat Kota Surabaya sekaligus menampung pengaduan terkait pelayanan publik. Dapat diunduh di playstore dengan nama : WargaKu Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut.
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	Aplikasi PPID <a href="https://ppid.surabaya.go.id">https://ppid.surabaya.go.id</a> (Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik PPID Kota Surabaya)
44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5	<i>Website</i> JDIH Kota Surabaya <a href="https://jdih.surabaya.go.id">https://jdih.surabaya.go.id</a> (Jaringan Dokumentasi Instansi Hukum) Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut.
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 (Sektor Kesehatan)	5	Aplikasi atau <i>website</i> Sektor Kesehatan untuk layanan Pendaftaran Online Puskesmas dan RSUD ( <i>e-Health</i> ) <a href="https://ehealth.surabaya.go.id">https://ehealth.surabaya.go.id</a> Dokumen Evaluasi dan Dokumen Tindak Lanjut.











- f. *ePerformance*, sistem aplikasi layanan berbasis elektronik untuk memajemen kinerja pegawai dalam penilaian agar lebih terukur, objektif, akuntabel, transparan. Sehingga dapat terwujud manajemen pegawai berdasarkan dari prestasi kerja pada lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

E. Data Dukung Tim Koordinasi SPBE



Gambar 4.7 Surat Keputusan Tim Koordinasi SPBE Kota Surabaya

Data dukung dari Indikator 19 terkait pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah berupa surat keputusan oleh Walikota Surabaya. Penyusunan surat keputusan terkait Tim Koordinasi SPBE lingkungan Kota Surabaya, berdasarkan ketentuan dari Peraturan MENPAN No.59 Tahun 2020 terkait pemantauan serta evaluasi SPBE. Tingkat kematangan dari Indikator Tim Koordinasi mencapai level 5. Dengan penjelasan Indikator yaitu terdapat dokumentasi terkait Tim Koordinasi SPBE dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan sudah dilakukan evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan tugas atau program kerja secara berkala.











































Tabel 4.12 Indeks Aspek 2 SPBE

Aspek	Nama Aspek	Nilai / Bobot Aspek (%)		
2	Perencanaan Strategis SPBE	10.00		
Indikator	Nama Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Bobot Indikator (%)	NI × BI (%)
11	Perencanaan Strategis SPBE terkait Arsitektur SPBE	2	2.5	5
12	Perencanaan Strategis SPBE terkait Peta Rencana SPBE	2	2.5	5
13	Perencanaan Strategis terkait Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2	2.5	5
14	Perencanaan Strategis terkait Inovasi Proses Bisnis	5	2.5	12.5
Jumlah (NI × BI) =				27.5
Indeks Aspek 2 SPBE = $1/BA \times \text{Jumlah (NI} \times \text{BI)}$				<b>2.75</b>

Penilaian Indeks Aspek 2 terkait perencanaan strategis pada Pemerintah Kota Surabaya memiliki nilai sebesar 2.75. Indikator dalam Aspek 2 SPBE pada evaluasi ini memiliki tingkat kematangan yang berbeda, dengan penjelasan tingkat kematangan yang diperoleh tiap Indikator sebagai berikut :

- Pada Indikator terkait Arsitektur, Peta Rencana, dan Keterpaduan Rencana dan Anggaran mencapai level 2 (terkelola) yaitu proses perencanaan telah terdefinisi dan didokumentasikan. tetapi pelaksanaan pada unit kerja sesuai persepsi serta fungsi manajemen masing-masing.
- Indikator perencanaan inovasi proses bisnis, sudah dilaksanakan secara keseluruhan dengan pedoman dan dilakukan evaluasi yang kemudian terdapat tindak lanjut atau perubahan.









Tabel 4.16 Indeks Aspek 6 SPBE

Aspek	Nama Aspek	Nilai / Bobot Aspek (%)		
6	Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.50		
Indikator	Nama Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Bobot Indikator (%)	NI × BI (%)
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1.5	1.5
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1.5	1.5
31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1.5	1.5
Jumlah (NI × BI)				4.5
Indeks Aspek 6 SPBE = $1/BA \times \text{Jumlah (NI} \times \text{BI)}$				<b>1</b>

Hasil dari perhitungan Nilai Indeks Aspek 6 pada evaluasi SPBE di atas menunjukkan nilai 1. Tingkat kematangan dari setiap indikator pada Aspek 6 masih berada pada level 1 (rintisan). Pelaksanaan audit yang dilaksanakan secara tidak terencana, tidak terdapat dokumentasi, sehingga hasil tidak bisa diketahui atau diprediksi.

#### G. Hitung Indeks Aspek 7

Aspek ketujuh dalam pedoman evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terkait layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Layanan yang mendukung jalannya internal organisasi pemerintah dalam menjalankan kegiatan untuk peningkatan kinerja serta akuntabilitas di Pemerintah Daerah maupun Instansi Pusat. Layanan administrasi pemerintahan penerapannya secara pembangunan serta pengembangan Aplikasi umum.



37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik	5	2.75	13.75
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik	5	2.75	13.75
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik	5	2.75	13.75
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik	5	2.75	13.75
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik	5	2.75	13.75
Jumlah (NI × BI) =				137.5
Indeks Aspek 7 SPBE = 1/BA × Jumlah (NI × BI)				<b>5</b>

Penilaian tingkat kematangan pada Aspek 7 terkait Layanan Administrasi pada evaluasi SPBE ini menghasilkan nilai sebesar 5. Indikator pada setiap Aspek 7 mencapai level tingkat kematangan 5 (optimum) yaitu layanan telah memenuhi kolaborasi antar layanan unit kerja. Sistem elektronik dilakukan perbaikan serta peningkatan secara berkelanjutan sesuai hasil dari evaluasi, perubahan undang-undang maupun kebutuhan layanan.

















Tabel 4.24 Nilai Indeks SPBE

Domain	Nama Domain	Nilai Indeks Domain	Bobot Domain (%)	ND × BD (%)
1	Kebijakan Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	5	13	65
2	Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	25	75
3	Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.73	16.5	28.5
4	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.87	45.5	221.5
Jumlah (ND × BD) =				390
Total Nilai Bobot Domain				100
Indeks SPBE =				<b>3.90</b>

Hasil Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada evaluasi tingkat kematangan di Pemerintahan Kota Surabaya menghasilkan nilai sebesar 3.88 dan masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Nilai yang didapat menunjukkan bahwa proses penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Surabaya berjalan dengan baik sesuai kebutuhan dan tujuan organisasi meskipun terdapat beberapa aspek yang masih belum terpenuhi karena adanya kebijakan atau regulasi baru.

























